



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB UNIT KERJA : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH SEWU
LAWU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUHARDI
2. Jabatan : KEPALA CABANG
3. NHK : 415464

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.903.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/126 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m²/140 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1100 m²/130 m² di SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 4205 m² di SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.051.250.000
5. Tanah Seluas 810 m² di SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 202.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 242.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 56.231.250**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 50.185.831**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.252.167.081



III. HUTANG

Rp.

969.445.847

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.282.721.234

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.